

Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kabupaten Aceh Besar

Mahratul Husna, Intan Qurratulaini, Isnaliana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

hmahratul@gmail.com, intan.qurratulaini@ar-raniry.ac.id, isnaliana@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to analyze the community's perceptions and understanding of the establishment of the Red and White Village Cooperative (KDMP) from an Islamic economic perspective in Blang Village, Blang Bintang Subdistrict, Aceh Besar Regency. This study employs a qualitative methodology combined with a phenomenological design. Data were collected through interviews and comprehensive documentation with eight informants selected through purposive sampling. The data were then analyzed through organization, coding, categorization, and interpretation, with validity testing conducted via triangulation and member verification. The findings indicate that the community generally holds a positive perception of the KDMP as a means to improve well-being through the strengthening of microenterprises and the provision of access to capital, though this is accompanied by a cautious attitude regarding the transparency of management. The public's understanding of cooperatives remains limited to practical aspects and has not yet fully encompassed the concept of cooperatives as a collective economic system. From an Islamic economic perspective, values such as ta'awun, amanah, musyawarah, and kemaslahatan have been socially internalized but have not yet been implemented optimally in institutional practice. This study concludes that the success of the KDMP depends not only on institutional aspects but also on the readiness of the community, particularly in terms of understanding, perception, and trust in cooperatives.

Keywords: public perception; public understanding; red and white village cooperative; sharia economics

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari perspektif ekonomi Islam di Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan desain fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi menyeluruh dengan delapan informan yang dipilih secara purposif. Kemudian dianalisis melalui pengorganisasian, pengkodean, pengkategorian, dan interpretasi dengan uji validitas melalui triangulasi dan verifikasi anggota. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki persepsi positif terhadap KDMP sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan usaha mikro dan penyediaan akses modal, meskipun disertai dengan sikap waspada terkait transparansi pengelolaan. Pemahaman masyarakat tentang koperasi masih terbatas pada aspek praktis dan belum sepenuhnya mencakup konsep koperasi sebagai sistem ekonomi kolektif. Dari perspektif ekonomi Islam, nilai-nilai seperti ta'awun, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan telah diinternalisasi secara sosial namun belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik kelembagaan. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan KDMP tidak

hanya bergantung pada aspek kelembagaan tetapi juga pada kesiapan masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman, persepsi, dan kepercayaan terhadap koperasi.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat; Pemahaman Masyarakat; Koperasi Desa Merah Putih; Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dengan menempatkan desa sebagai basis utama penguatan ekonomi kerakyatan. Desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas administratif, tetapi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992) tentang perkoperasian, koperasi berfungsi sebagai sokoguru perekonomian nasional dengan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan (Syahputra & Harahap, 2023). Koperasi di desa berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan alat pemberdayaan sosial. Melalui partisipasi aktif anggota, koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi secara kolektif. (Widyaningsih, 2025) menunjukkan bahwa apabila didukung oleh kesadaran anggota dan tata kelola yang baik, koperasi desa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga. Namun, hasil ini berbeda dengan (Mujiyanti, 2023) yang menyoroti bahwa banyak koperasi tidak berfungsi dengan baik karena partisipasi anggota yang rendah. Namun, (Kadek et al., 2023) menyatakan bahwa melalui mekanisme usaha bersama, koperasi unit desa dapat memperkuat posisi tawar masyarakat, khususnya petani. Temuan yang berbeda menunjukkan bahwa faktor sosial, khususnya persepsi dan pemahaman masyarakat, sangat memengaruhi keberhasilan koperasi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, koperasi merupakan representasi praktik muamalah yang berlandaskan prinsip keadilan, kerja sama, dan kemaslahatan. Operasional koperasi syariah menekankan pada penghapusan riba, gharar, dan maysir serta penguatan akad yang berbasis hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. (Lailia et al., 2025) menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota secara lebih berkelanjutan dalam koperasi. Namun, (Handayani et al., 2020) menemukan bahwa karena kurangnya pengetahuan masyarakat, koperasi sering dianggap secara sempit sebagai lembaga simpan pinjam daripada sebagai organisasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan dan kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akar rumput masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsep koperasi syariah. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. KDMP dibuat sebagai wadah usaha kolektif yang menggabungkan berbagai aktivitas ekonomi desa, seperti perdagangan, simpan pinjam, dan pengelolaan komoditas unggulan (Arief, 2025). Diharapkan program ini dapat memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan dan mendorong ekonomi desa untuk berkembang sendiri.

Program KDMP di Provinsi Aceh memiliki konteks khusus karena wilayah tersebut menerapkan syariat Islam dan memiliki tradisi sosial keagamaan yang kuat. Sebagai informasi yang dikumpulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, hingga pertengahan tahun 2025 akan terbentuk ribuan KDMP di berbagai gampong, dengan ratusan di antaranya terletak di Kabupaten Aceh Besar (Aceh, 2025). Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menunjukkan komitmennya untuk memperluas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah setempat juga menyebutkan bahwa wilayahnya memiliki 222 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai gampong. Dari jumlah tersebut, 21 titik telah rampung sepenuhnya, sementara 201 titik masih dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan bahwa KDMP telah menjadi salah satu inisiatif strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar sambil memperkuat kelembagaan ekonomi lokal (Alfath, 2026).

Salah satu lokasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah Gampong Blang di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Kampung ini memiliki ciri-ciri masyarakat religius dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi ini, analisis pendekatan ekonomi syariah menjadi penting, terutama terkait dengan cara masyarakat melihat dan memahami koperasi desa. Secara fenomenologis, keberadaan program itu sendiri bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap KDMP, nilai-nilai seperti ta'awun (kerja sama) juga tercermin dalam praktik koperasi, seperti dalam partisipasi anggota dan semangat saling membantu dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, prinsip Amanah juga dikenal sebagai kepercayaan menjadi komponen penting yang membentuk opini publik, terutama yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dan kejujuran pengurus koperasi.

Dari sisi pemahaman, masyarakat menunjukkan variasi tingkat pemahaman terhadap tujuan dan mekanisme KDMP yang berimplikasi pada tingkat partisipasi mereka. Kesadaran akan pentingnya kemaslahatan (manfaat bersama) yang dihasilkan koperasi, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penguatan ekonomi lokal, biasanya dikaitkan dengan pemahaman yang baik. Sebaliknya, pemahaman yang rendah dapat menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan koperasi. Selain itu, penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan koperasi merupakan indikator penting tentang bagaimana masyarakat memaknai keberadaan KDMP. Keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami apa yang mereka lakukan, tetapi juga menerima koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, peristiwa di Gampong Blang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan KDMP tidak hanya bergantung pada komponen struktural program, tetapi juga pada persepsi dan pemahaman masyarakat yang dibentuk melalui penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari koperasi.

Namun demikian, kelembagaan dan kesiapan sosial masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan KDMP (Sari, 2025) dan (Suyitno et al., 2025).

Ini menunjukkan bahwa persepsi, pemahaman, dan kesiapan partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program koperasi lokal. Dalam hal ini, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip koperasi dapat menghambat keberhasilan program KDMP. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa banyak Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk secara legal justru belum berjalan optimal akibat lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya keterlibatan anggota, yang secara langsung berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip koperasi. Selain itu, ketiadaan sistem administrasi yang tertib dan tata kelola yang baik juga menjadi kendala dalam operasional koperasi (Mufid & Ardianti, 2025), sehingga memperkuat bahwa aspek pemahaman dan kesiapan kelembagaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa koperasi desa juga menghadapi masalah yang mengganggu efisiensi operasional, seperti ketidaksesuaian antara permintaan anggota dan kapasitas pelayanan koperasi, yang mengakibatkan layanan yang buruk dan kepuasan anggota yang lebih rendah (Made et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa selain pemahaman masyarakat, aspek pengelolaan dan kualitas pelayanan koperasi juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan KDMP.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji koperasi desa dan Koperasi Merah Putih, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek kinerja ekonomi dan tata kelola kelembagaan, serta menempatkan masyarakat hanya sebagai objek penerima manfaat. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis persepsi dan pemahaman masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah berbasis empat prinsip utama, yaitu ta'awun, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah, pada level gampong masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Aceh yang religius dalam membentuk persepsi dan pemahaman terhadap koperasi desa juga belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap kesiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif ekonomi syariah serta bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep, tujuan, dan prinsip koperasi tersebut dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan ta'awun, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kesiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep dan prinsip koperasi dalam perspektif ekonomi syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Persepsi masyarakat didefinisikan sebagai proses individu maupun kelompok dalam menafsirkan dorongan sosial berdasarkan pengalaman, informasi, dan konteks lingkungannya. Ini dikenal sebagai kajian sosial. Persepsi tidak hanya

bersifat kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang membentuk cara pandang seseorang terhadap suatu fenomena. Persepsi memengaruhi sikap dan perilaku sosial, menurut (Fikri, 2024). Persepsi positif cenderung mendorong partisipasi, sedangkan persepsi negatif dapat menyebabkan penolakan atau ketidakpedulian terhadap suatu program. Dengan demikian, pemahaman masyarakat adalah kemampuan seseorang untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan akses terhadap informasi sangat memengaruhi tingkat pemahaman. Pemahaman yang baik akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, sedangkan pemahaman yang kurang dapat menyebabkan tujuan kebijakan tidak jelas (Fikri, 2024). Keberhasilan koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis partisipasi dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap tujuan, prinsip, dan mekanisme operasinya.

Dalam perspektif ekonomi syariah, tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi (Sa'diyah, M., & Gumilar, A. G. (2021). Penerapan maqashid syariah dalam kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat, seperti koperasi syariah, menjadi landasan penting untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan keadilan sosial melalui prinsip tolong-menolong dan kebersamaan (Nurhadi, 2018). Selain itu, prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi dikuatkan, yang memungkinkan penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam praktik ekonomi (Srisusilawati et al., 2022). Oleh karena itu, prinsip ta'awun, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah menjadi fondasi utama koperasi syariah untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang adil, berpartisipasi, dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. (Lailia et al., 2025) menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan, koperasi berbasis maqashid syariah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan koperasi. Di sisi lain, (Syahputra & Harahap, 2023) menemukan bahwa semakin banyak koperasi syariah di Indonesia. Ini menunjukkan minat masyarakat yang besar terhadap lembaga ekonomi berbasis syariah. Namun, (Mujiyanti, 2023) menunjukkan bahwa partisipasi anggota yang rendah tetap menjadi kendala utama keberlanjutan koperasi, sehingga kondisi tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi kinerja.

(Lutfi, 2025) menyatakan bahwa dalam aspek operasional, penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama dalam sistem bagi hasil dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan stabilitas kelembagaan. (Prayusniar et al., 2025) mengatakan bahwa pertumbuhan koperasi syariah di era digital membuka banyak peluang untuk berkembang. Namun, mereka masih menghadapi tantangan

dalam literasi digital dan adaptasi teknologi. Studi menunjukkan, khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih, bahwa faktor sosial masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program. (Sari, 2025) menemukan bahwa persepsi dan kesiapan masyarakat memengaruhi tingkat partisipasi. Di sisi lain, (Suyitno et al., 2025) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang KDMP sangat terbatas dan dipengaruhi oleh akses informasi yang diterima.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu umumnya berkonsentrasi pada beberapa hal utama: (1) bagaimana koperasi membantu ekonomi berkembang, (2) bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam koperasi, (3) bagaimana koperasi syariah berkembang secara makro, dan (4) masalah operasional dan kelembagaan koperasi. Sementara itu, penelitian tentang Koperasi Desa Merah Putih lebih banyak berfokus pada strategi pembangunan, manajemen, dan kesiapan kelembagaan. Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan persepsi dan pemahaman masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah pada level gampong masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menilai kesiapan pembentukan koperasi berbasis empat prinsip utama, yaitu ta'awun, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah. Ini terutama berlaku dalam konteks sosial budaya dan religius masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara simultan persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif ekonomi syariah pada tingkat gampong. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan koperasi desa berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk memahami secara mendalam persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggalian makna dan pengalaman subjektif masyarakat terhadap fenomena sosial yang mereka alami, bukan pada pengujian hipotesis (Cresweel, 2018). Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2026 di Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Subjek penelitian adalah individu dari masyarakat yang terlibat dan memahami proses pembentukan koperasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi dengan tujuan penelitian, seperti keterlibatan dalam musyawarah desa, pemahaman terhadap koperasi, serta pengetahuan mengenai prinsip ekonomi syariah.

Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai metode utama untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang pembentukan Koperasi Desa Merah

Putih, khususnya tentang penerapan prinsip ta'awun, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah. Data pendukung terdiri dari notulen musyawarah desa, struktur kepengurusan, dan dokumen resmi pembentukan koperasi. Fokus utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh pedoman wawancara berbasis indikator. Indikator-indikator ini meliputi pandangan masyarakat tentang keberadaan koperasi dan manfaatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manajemen, pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip koperasi syariah, dan kesiapan masyarakat untuk menjadi anggota.

Analisis data adalah proses kualitatif yang mencakup pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, pengkodean, pengelompokan ke dalam kategori, dan interpretasi maknanya (Cresweel, 2018). Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan pola dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami berdirinya Koperasi Desa Merah Putih. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mengontraskan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia. Selain itu, dilakukan member check dengan mengonfirmasi kembali temuan kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna dengan pengalaman yang mereka sampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan delapan informan yang terdiri dari masyarakat yang memiliki keterlibatan serta pengetahuan terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Informan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, seperti keterlibatan dalam kegiatan musyawarah desa dan pemahaman terhadap koperasi.

Tabel 1. Karakteristik informan penelitian

Sumber: Data Primer, April (2026)

No	Informan	Jenis kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1	Informan 1	Perempuan	Ibu rumah tangga	Masyarakat
2	Informan 2	Laki laki	Petani	Masyarakat
3	Informan 3	Perempuan	Pelaku UMKM	Masyarakat
4	Informan 4	Perempuan	Pedagang	Masyarakat
5	Informan 5	Perempuan	Petani	Masyarakat
6	Informan 6	Perempuan	Petani	Masyarakat
7	Informan 7	Laki laki	Peternak	Masyarakat
8	Informan 8	Perempuan	Pelaku UMKM	Masyarakat

Persepsi Masyarakat Terhadap Pembentukan KDMP

Hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebagian besar

informan mengatakan mereka mengenal KDMP dari berbagai sumber, seperti media, interaksi sosial di lingkungan sekitar, dan kegiatan yang sedang di jalankan pada setiap desa. Pemahaman awal ini menyatakan bahwa koperasi memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat melihat KDMP sebagai alat yang dapat membantu pertumbuhan usaha mikro, terutama dalam hal memberikan akses ke permodalan dan memperkuat sektor usaha seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan. Beberapa informan juga berpendapat bahwa keberadaan koperasi dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan membuka peluang kerja baru (wawancara dengan masyarakat). Ini ditunjukkan oleh pernyataan informan yang menyatakan bahwa koperasi dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha, memungkinkan mereka untuk tidak lagi bergantung pada pembiayaan dari luar desa.

Namun, persepsi positif ini tidak bersifat mutlak. Selain itu, masyarakat sangat hati-hati dalam menilai pembentukan KDMP, terutama dalam hal pengelolaan dan transparansi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menekankan bahwa pengelolaan dana koperasi harus jujur dan terbuka (wawancara dengan Masyarakat), yang merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu faktor penting yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap koperasi adalah kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, masyarakat percaya bahwa keberhasilan KDMP sangat bergantung pada partisipasi aktif anggota, yang mencakup partisipasi dalam keputusan dan musyawarah. Informan mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam rapat dan kegiatan koperasi dapat meningkatkan pemahaman dan rasa memiliki koperasi (wawancara dengan masyarakat). Oleh karena itu, persepsi masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman sosial, kepercayaan, dan harapan terhadap keuntungan ekonomi. serta sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pengelolaan koperasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pembentukan KDMP dipengaruhi oleh interaksi antara pengalaman sosial, ekspektasi manfaat ekonomi, dan informasi yang diterima. Penemuan ini sejalan dengan teori persepsi, yang menyatakan bahwa pengalaman dan informasi yang diperoleh memengaruhi persepsi individu (Fikri, 2024). Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan (Mujiyanti, 2023) dan (Handayani et al., 2020), yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kepercayaan anggota koperasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya bersikap skeptis, melainkan menunjukkan sikap yang rasional dan selektif dalam menilai program koperasi, khususnya dalam konteks pembentukan KDMP di tingkat desa.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Dan Prinsip KDMP

Hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebagian besar informan menganggap

koperasi sebagai lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dan memberikan modal usaha (wawancara dengan masyarakat). Pengalaman praktis dan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui interaksi sosial maupun pengamatan praktik koperasi di lingkungan sekitar, biasanya membentuk pemahaman ini. Oleh karena itu, koperasi lebih dilihat sebagai lembaga keuangan sederhana yang berfokus pada kebutuhan jangka pendek daripada sebagai organisasi ekonomi kolektif yang didorong oleh nilai solidaritas dan pemberdayaan anggota.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami sepenuhnya tujuan koperasi sebagai wadah ekonomi yang menekankan kepemilikan, solidaritas, dan partisipasi aktif. Sebagian informan mengakui bahwa mereka belum memahami prinsip-prinsip koperasi seperti musyawarah, tanggung jawab bersama, dan pembagian hasil usaha (SHU). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih bersifat praktis dan instrumental, lebih menekankan pada keuntungan langsung yang dapat diperoleh. Namun, elemen konseptual yang merupakan dasar sistem perkoperasian belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pola pikir masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang memahami konsep dan prinsip KDMP. Ini menunjukkan bahwa proses internalisasi pengetahuan koperasi belum berjalan dengan baik. Literasi perkoperasian yang rendah dapat berdampak negatif pada tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi, terutama dalam hal pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengelolaan organisasi secara kolektif. Dengan kata lain, jika tidak dipahami dengan benar, partisipasi masyarakat berisiko hanya bersifat administratif daripada partisipatif substansial yang merupakan inti dari koperasi itu sendiri.

Sebaliknya, kondisi ini tidak sepenuhnya menghalangi pembentukan KDMP di tingkat desa. Ini ditunjukkan oleh pernyataan informan yang terus-menerus yang menunjukkan keinginan untuk bergabung sebagai anggota koperasi meskipun pemahaman mereka masih terbatas (wawancara dengan masyarakat). Temuan ini menunjukkan bahwa pendorong utama partisipasi masyarakat adalah komponen kebutuhan ekonomi, seperti akses ke permodalan, peningkatan pendapatan, dan harapan perbaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, motivasi ekonomi lebih penting daripada pemahaman konseptual dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam KDMP.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang menarik antara pemahaman masyarakat dan partisipasi. Di mana kekurangan pengetahuan tidak menghambat partisipasi secara langsung, keterlibatan justru diimbangi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam situasi seperti ini, koperasi dilihat sebagai solusi praktis untuk masalah ekonomi masyarakat. Namun, nilai-nilai dasar koperasi masih belum dipahami secara menyeluruh. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan KDMP, terutama dalam hal meningkatkan kapasitas dan literasi anggota melalui pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mufid & Ardianti, 2025) yang menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pengembangan KDMP adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip koperasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk pendampingan dan edukasi untuk meningkatkan kemampuan anggota. Selain itu, temuan penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa literasi koperasi yang rendah adalah kendala utama dalam pengembangan koperasi di tingkat masyarakat. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa, selama masyarakat memiliki motivasi ekonomi yang kuat dan kebutuhan yang nyata terhadap koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, keterbatasan pemahaman tidak selalu menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan KDMP dalam jangka panjang.

Implementasi nilai-nilai syariah dalam persepsi masyarakat

Hasil wawancara yang dilakukan di Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengenal dan memahami nilai-nilai syariah seperti kemaslahatan, ta'awun, amanah, dan musyawarah sebagai bagian dari kehidupan sosial sehari-hari (wawancara dengan masyarakat). Nilai-nilai tersebut tidak hadir sebagai konsep yang asing, melainkan telah terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat, terutama dalam bentuk gotong royong, kepedulian antarwarga, serta kebiasaan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan di tingkat desa.

Selain itu, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa nilai ta'awun tercermin dalam berbagai aktivitas sosial, seperti bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan dan saling membantu dalam situasi ekonomi tertentu. Dengan cara yang sama, prinsip musyawarah telah menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, baik di forum formal seperti rapat desa maupun di kehidupan sosial sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah telah diterima dan diterapkan sebagai standar sosial di masyarakat.

Namun, implementasi nilai-nilai tersebut belum optimal ketika dihadapkan pada kelembagaan koperasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip amanah, yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan koperasi, belum sepenuhnya diterapkan dalam bentuk sistem yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana koperasi, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada perbedaan antara cara orang memahami nilai-nilai syariah sebagai standar sosial dan cara mereka diterapkan dalam praktik kelembagaan ekonomi. Meskipun prinsip-prinsip moral seperti amanah dan keadilan belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem manajemen koperasi yang profesional dan transparan. Dengan kata lain, nilai-nilai syariah masih diinternalisasi pada tingkat individu dan sosial, tetapi belum sepenuhnya masuk ke dalam struktur kelembagaan koperasi.

Dalam perspektif maqashid syariah, situasi ini menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum tercapai secara optimal karena masih ada kemungkinan ketidakpercayaan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan koperasi. Terlepas dari fakta bahwa prinsip syariah telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, penerapan mereka dalam lingkungan kelembagaan memerlukan penguatan melalui sistem yang lebih transparan dan berpartisipasi. Oleh karena itu, keberhasilan KDMP bergantung pada penerimaan nilai-nilai syariah serta kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lutfi, 2025) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi syariah sangat penting untuk keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa integrasi antara nilai-nilai syariah dan sistem kelembagaan yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan koperasi yang berkelanjutan dan mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Implikasi Temuan Terhadap Pengembangan KDMP

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, khususnya persepsi dan pemahaman masyarakat, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Persepsi masyarakat yang cenderung positif terhadap keberadaan koperasi adalah faktor penting dalam mendorong penerimaan masyarakat terhadap KDMP, tetapi persepsi positif ini harus diimbangi dengan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami koperasi secara praktis, tetapi juga secara konseptual sebagai lembaga ekonomi berbasis partisipasi dan kebersamaan.

Selain itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat sangat penting untuk menjamin keberlanjutan KDMP. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ekonomi syariah seperti amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi sangat penting. Dibutuhkan praktik pengelolaan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan cara penting untuk meningkatkan legitimasi sosial koperasi di tengah masyarakat.

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sangat penting untuk keberhasilan koperasi desa. Sikap dan keterlibatan terhadap koperasi dipengaruhi oleh persepsi, pemahaman, dan prinsip masyarakat. Akibatnya, pembangunan KDMP harus mempertimbangkan tidak hanya aspek kelembagaan dan ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya, yang merupakan komponen penting dalam membangun keberlanjutan koperasi.

Dengan demikian, pengembangan KDMP yang berkelanjutan memerlukan pendekatan integratif, yang menggabungkan pemberdayaan sosial masyarakat dengan kekuatan kelembagaan. Peningkatan pengetahuan tentang koperasi, peningkatan kapasitas pengelola, dan penerapan sistem manajemen yang transparan dan terlibat dapat membantu mencapai tujuan ini. Dengan metode ini, KDMP

diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi yang berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Gampong Blang memiliki persepsi yang lebih positif tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang tercermin dari keyakinan bahwa KDMP dapat membantu meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan usaha mikro dan akses permodalan. Namun, persepsi ini disertai dengan sikap yang lebih berhati-hati, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam penerimaan koperasi. Masyarakat telah memahami fungsi dasar koperasi, tetapi mereka masih terbatas pada aspek praktis dan belum sepenuhnya memahami koperasi sebagai sistem ekonomi kolektif yang didasarkan pada partisipasi dan kebersamaan. Namun, keterbatasan pemahaman ini tidak menjadi hambatan utama dalam partisipasi karena dorongan kebutuhan ekonomi lebih dominan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, nilai-nilai ta'awun, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan telah diinternalisasi sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Namun, penerapan nilai-nilai ini dalam praktik kelembagaan koperasi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal amanah yang berkaitan dengan transparansi dan kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan dalam kerangka maqashid syariah masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola koperasi. Secara keseluruhan, keberhasilan pembentukan dan pengelolaan KDMP tidak hanya bergantung pada elemen kelembagaan, tetapi juga kesiapan masyarakat secara keseluruhan, yang mencakup pemahaman, persepsi, dan tingkat kepercayaan masyarakat, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah secara konsisten dan berkelanjutan.

Penguatan pemahaman masyarakat mengenai Koperasi Desa Merah Putih perlu menjadi perhatian utama, terutama terkait konsep, tujuan, dan prinsip koperasi dalam perspektif ekonomi syariah. Sosialisasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan diperlukan agar masyarakat tidak hanya memahami koperasi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai sistem ekonomi kolektif yang berbasis kebersamaan dan partisipasi. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara teratur akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan koperasi. Kepercayaan dibangun melalui pengawasan internal yang efektif berbasis musyawarah, partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, dan informasi yang terbuka.

Pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelola koperasi membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait. Diharapkan upaya ini mampu mendorong penerapan nilai-nilai ekonomi syariah seperti ta'awun, amanah,

kemaslahatan, dan musyawarah, agar menjadi nilai normatif dan terwujud dalam praktik kelembagaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, D. K. D. U. P. (2025). *Pembentukan Kopdes merah putih di Aceh sudah 100 persen*. <https://aceh.antaranews.com/berita/386973/pembentukan-kopdes-merah-putih-di-aceh-sudah-100-persen.com>
- Alfath. (2026). *Aceh Besar memiliki 222 titik kopdes merah putih, baru rampung 21 titik*. The Aceh Post. <https://theacehpost.com/news/aceh-besar-miliki-222-titik-kopdes-merah-putih-baru-rampung-21-titik/index.html>
- Arief, S. & H. H. (2025). Strategi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan Literatur atas Praktik Terbaik dan Tantangan Global. *Al-Buhuts*, 21(1), 284–299.
- Cresweel, J. W. & J. D. C. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). <https://lcn.loc.gov/2017044644>
- Dr. Fikri, S. P. M. S. (2024). *Psikologi Sosial* / (1 st). PT Penamuda Media.
- Fadya Prayusniar, Mira, Shovia Tul Jannah, K. (2025). Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 21–30.
- Handayani, T., Dominggus Sore, A., & Astikawati, Y. (2020). PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOPERASI UNIT DESA BALE YOTRO DESA BELOYANG. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 1–12. <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/>
- Kadek, I., Putra, B., & Ayuningsasi, A. A. K. (2023). PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN JEMBRANA. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana (E-Jurnal EP Unud)*, 12(9), 586–599.
- Lutfi, M. (2025). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah 2025 *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(4), 164–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14730710>
- Made, N., Mardika, K., Hapsari, N. P., Sudarman, D., Ekonomi, F., & Jakarta, U. M. (2025). Strategi Operasional dalam Perspektif Koperasi Desa Merah Putih. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(9), 3413–3429. <https://doi.org/DOI:1047467/elmal.v6i9.8802>
- Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, E. S. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(6), 373–385. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Mufid, M., & Ardianti, A. D. (2025). PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK PENGUATAN USAHA SIMPAN PINJAM DI DESA SRANAK. *Journal of Research Applications in Community Services*, 4(3), 101–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/jarcoms.v4i3.5553>
- Mujiyanti, S. A. (2023). Koperasi Indonesia dan Permasalahannya. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(3), 1026–1029. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.653>

- Nurhadi. (2018). Maqashid koperasi syariah. *I-Economic*, 4(2), 159–179.
- Risma Nuril Lailia, Moh. Mukhsinin Syua'ibi, M. D. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dalam Perspektif Maqashid Syariah Risma Nuril Lailia, Moh. Mukhsinin Syua'ibi, M. Dayat Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1712–1726.
- Sari, R. E. P. (2025). EKSPLORASI PERSEPSI DAN KESIAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENDIRIAN KOPERASI MERAH PUTIH : STUDI KUALITATIF DI DESA KURAI TAJI, KOTA PARIAMAN. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6(2), 337–346.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., Nuraeni, S. K., & Bandung, U. I. (2022). *IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH*. 07(01), 1–11.
- Suyitno, Rokhimah, & Faizah, E. N. (2025). Transformasi Ekonomi Desa Melalui Koperasi Merah Putih: Kajian Persepsi Masyarakat di Youtube. *Jurnal Manajerial*, 12(03), 498–525.
<https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i03.9994>
- Syahputra, E., & Harahap, M. Y. (2023). Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 379–389.
<https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.742>
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pub. L. No. 25 (1992).
- Widyaningsih, D. A. (2025). THE ROLE OF COOPERATIVES IN IMPROVING THE ECONOMY OF RURAL COMMUNITIES FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE. *Margin : Journal Of Islamic Banking*, 5(2), 366–378.